

<https://doi.org/10.24042/alidarah.v10i2.7179>

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS (*Telaah atas UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta PP RI No.74 tentang Guru*)

Ali Murtadho

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung
alimurtado@radenintan.ac.id / aliemurtadho00@gmail.com

Abstract

The XXI century was marked by technological developments and the rapid flow of information. The development of technology and information flow has an impact on the role of teachers in the education and learning process. Therefore, people who choose their way of life to become teachers must find new roles that are more contextual. The task of the teacher in this context is to prepare the generation to face a new century filled with shock and uncertainty. UNESCO notes that teachers are an important element for developing positive or negative attitudes towards learning. The teacher has a role in promoting mutual understanding and tolerance among humanity. Speaking of the context of Indonesian education, where education problems are so complex, cannot be solved by the government alone. One of the revivals of the Indonesian nation and state lies in the role of the teacher. Therefore, in addressing these issues, teacher competencies need to be developed. This is done for pedagogical tasks oriented to the teacher's role as transformative intellectuals. Thus, a critical pedagogical paradigm can be used as an alternative in developing teacher competency.

Keywords: *Teacher Role, Teacher Competence, Critical Pedagogy*

Abstrak

Abad XXI ditandai dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang pesat. Perkembangan teknologi dan arus informasi ini membawa dampak bagi peran guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, orang yang memilih jalan hidupnya menjadi guru harus menemukan peran-peran baru yang lebih kontekstual. Tugas guru dalam konteks ini adalah menyiapkan generasi untuk menghadapi abad baru yang penuh dengan kegoncangan dan ketidakpastian. UNESCO mencatat bahwa guru merupakan elemen penting bagi pengembangan sikap yang positif atau negatif terhadap pembelajaran. Guru memiliki peran dalam mempromosikan saling pemahaman serta toleransi di antara umat manusia. Berbicara konteks pendidikan Indonesia—di mana permasalahan pendidikan begitu kompleks—tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Kebangkitan bangsa dan negara Indonesia salah satunya adalah terletak pada peran guru. Dalam menyikapi persoalan tersebut, kompetensi guru perlu dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk tugas pedagogis yang berorientasi pada peran guru sebagai intelektual transformatif. Oleh karena itu, paradigma pedagogis kritis dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan kompetensi guru.

Kata Kunci: *Peran Guru, Kompetensi Guru, Pedagogi Kritis*

PENDAHULUAN

Ada sekitar 2,7 juta guru di Indonesia yang sesungguhnya memegang kunci solusi dari permasalahan bangsa. Para guru tersebut diharapkan dapat mendedikasikan seluruh hidup dan cita-citanya pada pembangunan bangsa melalui pendidikan.ⁱ Namun, bila melihat konteks saat ini, masih ada masalah utama yang dihadapi para guru. Mengutip pendapat J. Sumardianta, bahwa persoalan yang dihadapi guru saat ini bukan lagi soal kesejahteraan, melainkan soal spirit dan keteladanan. J. Sumardianta berkeyakinan, bahwa masalah utama guru bukan sekadar kurikulum dan strategi pengajaran saja, melainkan bagaimana merawat daya semangat untuk memajukan pendidikan.ⁱⁱ

Pendapat J. Sumardianta di atas, ada benarnya. Karena, sejak disahkannya UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta program-program yang mengiringinya, misalnya program sertifikasi guru, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan guru relatif berkecukupan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan, bahwa alih-alih guru semakin meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran, justru kesejahteraan tersebut tidak jarang mendorong para guru semakin konsumtif.

H.A.R Tilaar dengan tegas mengungkapkan:

*“...Manakala dunia cenderung ke arah materialistis dan konsumerisme, profesi guru yang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi komoditas rakyat banyak, semakin lama semakin terpuruk. Guru telah menjadi semacam komoditi yang diperlukan tetapi tidak dihargai. Berbagai macam mitos yang menyelubungi, proses guru tanpa disadari bahwa profesi guru justru telah tertindas oleh materialisme dan konsumerisme”.*ⁱⁱⁱ

Padahal, konsepsi guru bila merujuk pada Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta merujuk Peraturan Pemerintah No. 74 Pasal 3 ayat 2,4,5,6, dan 7 menegaskan bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru adalah: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun, kompetensi-kompetensi guru tersebut alih-alih memperluas kerja guru, justru makin mempersempit kerja guru. UU dan PP tersebut memang mengkonsepkan guru sebagai tenaga profesional, namun di sisi lain ruang lingkup kerja guru hanya sebatas sekolah dan ruang kelas. UU dan PP tersebut sama sekali tidak mengatakan, bahwa tugas guru adalah mengubah diri peserta didik dan masyarakat serta mengambil keputusan dalam kebijakan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun nasional. Oleh karena itu, wacana guru sebagai tenaga profesional yang sempit perlu “dilawan” dengan wacana guru sebagai intelektual transformatif.^{iv}

Selanjutnya, bagaimana realitas Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang nota bene merupakan lembaga yang melahirkan guru? Selama ini, isi mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/i calon guru yang ada di LPTK, justru dipenuhi oleh konsep-konsep usang seperti alat pendidikan, kewibawaan, dan kedewasaan *an-sich*. Mahasiswa/i calon guru tersebut jarang atau bahkan tidak pernah membahas tentang konsep-konsep, seperti: *power (kekuasaan), ideology, hegemoni, dan capital cultural* yang dikaitkan dengan pendidikan dan pengajaran.^v

Bahkan, dalam membicarakan kurikulum, misalnya, mahasiswa/i calon guru di LPTK, sering kali hanya diajak mendiskusikan kurikulum dalam perspektif klasik. Dalam perspektif klasik, kurikulum hanya dilihat pada persoalan teknis-instrumental dalam bentuk implementasinya dalam proses pembelajaran. Bahkan, kurikulum tidak ada kaitannya dengan politik. Padahal, di dalam kurikulum tersebut sesungguhnya terdapat ideologi tersembunyi serta nilai-nilai yang sebenarnya dipaksakan oleh masyarakat dalam sistem pendidikan melalui kekuasaan.^{vi} Inilah yang mendasari pentingnya membicarakan kaitannya pendidikan dan kekuasaan (politik) dalam perspektif pedagogi kritis.

Dengan kata lain, mendiskusikan kurikulum adalah berbicara tentang sumber-sumber kekuasaan dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar generasi dalam suatu masyarakat. Dalam penyusunan kurikulum, bila ditelaah lebih kritis, sesungguhnya terdapat kekuasaan (*power*) yang menancapkan kukunya (*hegemoni*) dalam penentuan isi kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum yang berlaku dalam suatu negara kerap digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari kekuasaan.^{vii} Bahkan, guru dalam mengembangkan otonominya hampir selalu bersinggungan dengan pihak lain. Salah satu pihak yang bersinggungan dengan otonomi guru adalah kekuasaan.^{viii} Oleh karena itu, pendidikan guru perlu dikembangkan untuk tugas pedagogis berorientasi pada sosok guru sebagai intelektual transformatif. Di sinilah pentingnya mendiskusikan wacana pedagogi kritis dalam dunia pendidikan.^{ix}

MEMAHAMI KONSEP PEDAGOGI KRITIS (*CRITICAL PEDAGOGY*)

Mendiskusikan wacana pedagogi kritis, kita tidak bisa melepaskan nama seorang tokoh dari Brazil, Paulo Friere, yang memandang bahwa pendidikan merupakan sarana pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat perubahan sosial. Siapa saja yang menggeluti

wacana pedagogi kritis, mau tidak mau merujuk pada Paulo Friere. Hal ini didasarkan pada argumentasi, bahwa Paulo Friere sebagai “Seorang filosof pengukuh pedagogi kritis”.^x

Ada yang mengasosiasikan bahwa pedagogi kritis merupakan gagasan Henry Giroux. Giroux menggagas istilah ini di tahun 1980-an yang mana ia memandang bahwa “budaya positivistik” sering kali digunakan di sekolah-sekolah sebagai bentuk dari aturan social untuk mempertahankan status quo. Ada lagi yang mengasosiasikan bahwa pedagogi kritis didasarkan pada teoritikus kritis dari mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Herbert Marcuse. Para teoritikus kritis kontemporer seperti: Michael Apple, Ira Shor, dan bell hooks, juga dianggap sebagai tokoh yang memunculkan dan mengimplementasikan gagasan pedagogi kritis dalam pendidikan calon guru.^{xi}

Lalu, apa sebenarnya pedagogi kritis itu? Mendefinisikan pedagogi kritis agak sedikit kompleks dan tidak sederhana. Bahkan, Joe L. Kincheloe mengalami kesulitan untuk meringkas definisi istilah pedagogi kritis. Ia dalam tulisannya mengungkapkan: “*No matter how long I teach and write about critical pedagogy, I always find it difficult to define the term in a brief and compelling manner. The reason for this difficulty involves the fact that critical pedagogy is a complex notion that asks much of the educators and students who embrace It*”.^{xii} Namun demikian, hal yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa pedagogi kritis dapat membantu guru dalam mendidik dan merekonstruksi pekerjaan mereka sekaligus memfasilitasi dan memberdayakan para siswa. Joe L. Kincheloe dalam tulisannya mengungkapkan: “...*Critical pedagogy works to help teacher educators and teachers reconstruct their work so it facilitates the empowerment to all students*”.^{xiii} Barry Kanpol juga menjelaskan:

“Critical pedagogy refers to the means and methods that test and hope to change the structures of schools that allow inequalities and social injustices. Critical pedagogy is a cultural-political tool that takes seriously the notion of human differences, particularly as these differences relate to race, class, and gender. In its most radical sense, critical pedagogy seeks to unoppress the oppressed and unite people in a shared language of critique, struggle, and hope to end various forms of human suffering. Critical pedagogy incorporates a moral vision of human justice and decency as its common vision. Finally, critical pedagogy also addresses how one's beliefs and faith are embedded in schooling”.^{xiv}

Dalam penjelasan di atas dapat ditangkap intisarinya, bahwa pedagogi kritis berkenaan dengan alat-alat dan metode-metode yang di dalamnya terdapat harapan untuk merubah struktur-struktur persekolahan yang mengizinkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Pedagogi kritis adalah sebuah alat politik budaya yang mengambil dengan serius gagasan

tentang manusia seperti ras, kelas, dan gender. Pedagogi kritis ingin membebaskan yang tertindas dari sang penindas dengan melakukannya dengan bahasa kritik, perlawanan, dan harapan untuk mengakhiri bentuk-bentuk penderitaan manusia. Pedagogi kritis mengkorporasi sebuah visi moral tentang keadilan dan kesopanan manusia sebagai visi utamanya di mana keyakinan dan kepercayaan dapat ditanamkan di sekolah. Pedagogi kritis sering dipandang sebagai konsep yang bergelut dalam dua wilayah, yaitu: teori dan praksis. Pedagogi kritis menghendaki adanya pertautan antara teori dan praktis seiring sejalan. Tony Monchinski dalam tulisannya mengungkapkan:

“Critical pedagogy is a praxis, with praxis constituting “action and reflection”. Praxis involves theorizing practice and practicing theory. Praxis is thinking about what and why you’re going to do before you do it and then reflecting on what you did, how you did it, and how it turned out. Critical pedagogy involves an everevolving working relationship between practice and theory”.^{xv}

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai, bahwa pedagogi kritis dapat menjadi rujukan para guru dan peneliti dengan sebuah instrumen yang lebih baik dalam memahami peran sekolah tentang ras, kelas, dan gender dalam masyarakat yang terdiferensiasi. Hal ini sekaligus mempromosikan dan mempertanyakan pengalaman siswa, teks, ideologi guru, dan aspek analisis kebijakan sosial yang konservatif dan liberal. Pedagogi kritis bertujuan untuk membongkar teori pendidikan yang jauh dari pendekatan akademis dan memasukkan teori pendidikan tersebut ke dalam praktik pendidikan.^{xvi}

Pedagogi kritis pada dasarnya dapat dipahami dalam dua makna. *Pertama*, pedagogi kritis sebagai paradigma berfikir. Artinya, pedagogi kritis dibangun atas dasar *critical thinking* untuk selalu mempertanyakan dan mengkritisi pendidikan pada hal-hal fundamental pada tataran filosofis, teori, sistem, kebijakan maupun implementasi. *Kedua*, pedagogi kritis sebagai gerakan sosial, dimana tujuan akhir pedagogi kritis adalah melahirkan praksis pendidikan egaliter, humanis, demokratis, berbasis *critical thinking* di kalangan peserta didiknya.^{xvii}

Michael Vavrus sebagaimana dikutip Rahmat Hidayat menjelaskan, bahwa pedagogi kritis menawarkan cara untuk melihat pengajaran dan pembelajaran yang dapat membawa konsep kunci seperti ideologi, hegemoni, resistensi, kekuasaan, konstruksi pengetahuan, kelas, politik budaya, dan emansipatoris dari tindakan.^{xviii} Oleh karena itu, pedagogi kritis didefinisikan sebagai teori pendidikan dan praktik pembelajaran yang didesain untuk membangun kesadaran kritis mengenai kondisi sosial yang menindas.^{xix} Visi pedagogi kritis

dilandaskan pada suatu pemahaman, bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari pelbagai kepentingan. Tetapi, institusi pendidikan menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami dalam kerangka relasi-relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi. Mazhab pedagogi kritis berbasis pada keadilan dan kesetaraan. Pendidikan tidak hanya berkutat pada pertanyaan seputar sekolah, kurikulum, dan kebijakan pendidikan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesetaraan.^{xx}

Berikut ini adalah konsep utama yang membentuk pedagogi kritis seperti diungkapkan Joe. L. Kincheloe, yaitu: *pertama*, pedagogi didasarkan pada visi pendidikan dan sosial tentang keadilan dan kesetaraan. *Kedua*, pedagogi kritis dibentuk berdasarkan pada kepercayaan, bahwa pendidikan adalah bersinggungan dengan politik. *Ketiga*, pedagogi kritis didedikasikan untuk pengurangan pada penderitaan manusia. *Keempat*, pedagogi kritis memiliki pandangan, bahwa sekolah-sekolah jangan sampai melakukan kekerasan kepada para siswa, di mana pedagogi ini memandang sekolah yang baik adalah jangan menyalahkan siswa terhadap kegagalannya atau bahkan merampas/ mematahkan siswa dari pengetahuan mereka yang dibawa ke dalam ruang kelas.

Kelima, pedagogi kritis digunakan melalui penggunaan tema-tema umum untuk membaca kata dan dunia serta proses pendidikan hadap masalah, di mana tema-tema ini mencakup penggunaan isu-isu pendidikan yang berpusatkan pada kehidupan para siswa sebagai sebuah pendasaran dari kurikulum. *Keenam*, pedagogi kritis dipusatkan pada gagasan, bahwa para guru harus menjadi peneliti, artinya para guru belajar untuk memproduksi dan mengajarkan kepada siswa untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. *Ketujuh*, pedagogi kritis didasarkan pada gagasan, bahwa para guru menjadi peneliti dari siswa-siswanya, latar belakang kehidupannya, serta kekuatan yang membentuknya. *Kedelapan*, pedagogi kritis diarahkan untuk merawat sebuah keseimbangan yang lembut antara perubahan sosial dan memperkuat basis intelektual. *Kesembilan*, pedagogi kritis diarahkan kepada masyarakat kaum “pinggiran”, pengalaman-pengalaman individu yang berhadapan dengan penindasan dan penundukan/penaklukan. *Kesepuluh*, pedagogi kritis dibentuk kepada kesadaran, bahwa ilmu dapat digunakan sebagai sebuah kekuatan untuk mengatur dan mengontrol. *Kesebelas*, pedagogi kritis didedikasikan untuk memahami konteks aktivitas pendidikan. *Keduabelas*, pedagogi kritis berkomitmen untuk melawan bahaya yang

ditimbulkan dari dominasi kekuasaan. *Ketigabelas*, pedagogi kritis disesuaikan pada pentingnya kompleksitas dalam membangun sebuah pendidikan transformatif dan pendidikan yang benar.^{xxi}

Tony Monchinski dengan merujuk pendapat Paulo Freire menjelaskan, bahwa pedagogi kritis merupakan sebuah praksis yakni sebuah cara tentang melakukan sesuatu atau penggunaan sebuah teori/ keyakinan dalam melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat aksi dan refleksi. Praksis ini melibatkan teori dan praktik sekaligus serta tidak lupa untuk mempraktikkan teori tersebut.^{xxii} Sebagai sebuah praksis, pedagogi kritis tentunya tidaklah stagnan. Hal tersebut menuntut refleksi dan rekonseptualisasi tentang apa yang akan terjadi atau dilakukan di ruang kelas, mengapa ia terjadi, dan apa dan siapa yang akan mengakhiri. Pedagogi kritis merupakan pemahaman tentang relasi antara pendidikan dan lembaga sekolah yang di dalamnya terdapat hubungan individual antara siswa dan orang tua, para guru, tenaga administrasi, dan anggota masyarakat di mana salah satunya memainkan peran. Oleh karena itu, pedagogi kritis merupakan sebuah disiplin. Pedagogi kritis membutuhkan pemikiran dan perbuatan yang mendalam, refleksi dan aksi di mana salah satunya tidak bisa dipisahkan.^{xxiii}

Henry Giroux sebagaimana dikutip Tony Monchinski menjelaskan, bahwa pedagogi kritis merupakan pedagogi yang bersifat politis bertujuan untuk menghubungkan antara pemahaman dan keterlibatan secara kritis dengan isu-isu tentang tanggung jawab sosial, serta sarana apakah untuk mendidik hal tersebut kepada para siswa untuk merubah dunia secara kritis supaya kondisi ekonomi dan politik lebih demokratis.^{xxiv} Tony Monchinski menjelaskan, bahwa pedagogi kritis menuntut para guru dan para siswa secara bersama-sama untuk mempersoalkan asumsi-asumsi mereka dan keyakinan-keyakinan mereka terhadap fakta-fakta historis dan saintifik tentang doktrin politis dan keagamaan serta tatanan ekonomi. Pedagogi kritis mengungkap, bahwa semua bentuk-bentuk pendidikan adalah politis. Tidak ada sesuatu hal pun terlebih pendidikan yang bebas nilai, netral baik dari segi bentuk, isi atau pelayanan.^{xxv}

Pedagogi kritis menemukan bahwa secara pasti tidak ada pengetahuan yang bersifat netral yang dapat membentuk kesadaran manusia. Di dalam proses “mengetahui”, selalu saja terdapat pengaruh dari adanya relasi antara kuasa dan pengetahuan. Pedagogi kritis berusaha mengungkap relasi-relasi kuasa yang terdapat di dalam pengetahuan yang *legitimate*. Oleh karena itu, pendidikan kritis (*critical pedagogy*) adalah mazhab pendidikan yang meyakini

adanya muatan politik dalam semua aktifitas pendidikan. Dalam konteks akademik, mazhab ini disebut dengan “*the new sociology of education*” atau “*critical theory of education*”.^{xxvi}

Pedagogi kritis menekankan kepada perlunya kesadaran akan kemerdekaan anak manusia. Dengan kemerdekaan itu, peserta didik akan mulai mengasah dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk semakin lama semakin berdiri sendiri menjadi manusia yang merdeka.^{xxvii} Oleh karena itu, institusi pendidikan merupakan lembaga rekonstruksi sosial yang memberikan perhatian yang besar terhadap kelompok yang termarginalisasi melalui proses pemberdayaan. Hal utama yang menjadi fokus di dalam pedagogi kritis adalah melakukan dekonstruksi ideologi dan praktik-praktik diskriminasi di dalam sistem dan proses pendidikan.^{xxviii}

Bahkan, pedagogi kritis disebut “*transformative pedagogy*” karena pendidikan kritis meyakini perlunya perubahan menuju pemberdayaan.^{xxix} Pedagogik transformatif ini berfokus pada individu yang partisipatif di dalam perubahan sosial.^{xxx} Tujuannya adalah menyadarkan dan mengembangkan potensi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ini, peserta didik adalah subjek yang partisipatif dan antisipatif di dalam perubahan sosial.^{xxxi} Di sini dapat dimaknai, bahwa pedagogi kritis adalah teori pendidikan dan praktik pembelajaran yang dirancang untuk membangun kesadaran kritis^{xxxii} di tengah kondisi sosial yang menindas. Selain itu, pedagogi kritis adalah pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu peserta didik mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktik-praktik yang mendominasi.^{xxxiii}

PRINSIP-PRINSIP PEDAGOGI KRITIS (*CRITICAL PEDAGOGY*)

Barry Kanpol menjelaskan, bahwa hal terpenting bagi pedagogi kritis adalah harus memberikan pemahaman tentang “Pengetahuan dan identitas yang diproduksi di dalam dan di antara *setting* relasi sosial yang berbeda di dalam lingkungan sekolah”.^{xxxiv} Berbeda dengan pengajaran yang hanya menekankan pada strategi dan teknik penyampaian materi pelajaran, pedagogi kritis mengandung arti politis dan praksis secara simultan. Secara politis, pedagogi kritis senantiasa mempertanyakan pengetahuan, skill, nilai, dan sikap apa yang hendak dibangun dalam rangka *cultural capital*. Secara praksis pedagogi kritis berusaha memperkenalkan adanya determinasi politis yang terkandung di dalam dan di luar kelas.^{xxxv}

Prinsip-prinsip pedagogi kritis, sebagaimana diringkas Toto Suharto dapat ditentukan dalam poin-poin berikut.^{xxxvi} *Pertama*, tujuan utama pedagogi kritis adalah merebut kembali

kemanusiaan (*humanisasi*) setelah mengalami dehumanisasi. Proses humanisasi ini dilakukan dengan mengembalikan fitrah manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek. *Kedua*, untuk mengembalikan fitrah ontologis manusia, pedagogi kritis menolak pendidikan gaya bank, dan menggantikannya dengan pendidikan hadap masalah yang dilakukan dengan metode yang menekankan komunikasi ontologis. Dalam pedagogi kritis, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Guru bukan satu-satunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Guru bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-siswa bukanlah bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengindikasikan atasan-bawahan atau manajer-buruh, tetapi bersifat horizontal dan egalitarian. Guru dan siswa adalah sama-sama pembelajar (*learner*), subjek yang belajar bersama.

Ketiga, kurikulum pendidikan bukan hanya menekankan pada *academic achievement*, melainkan lebih diarahkan pada pembangunan aspek epistemologis, politis, ekonomis, ideologis, teknis, estetis, etis, dan historis. *Keempat*, institusi sekolah merupakan arena produksi budaya, maka penggunaan konsep hegemoni dan ideologi sebagai pisau analisis dalam pedagogi kritis merupakan hal yang esensial. *Kelima*, pedagogi kritis menilai posisi pendidik (guru) adalah sebagai pekerja budaya yang berperan sebagai intelektual transformatif. Dengan peran ini, tugas utama pendidik bukan hanya sebagai agen yang membentuk tubuh pengetahuan (*body of knowledge*), melainkan membantu peserta didik menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan ideologis dan politis. Artinya, menjadi intelektual transformatif adalah bagaimana membantu peserta didik (siswa) mengembangkan kesadaran kritisnya dengan menghubungkan dunia sekolah dengan ruang publik budaya, sejarah, dan politik.

Keenam, pedagogi kritis menyediakan wacana teoretis untuk memahami bagaimana kuasa dan pengetahuan satu sama lain dapat menginformasikan di dalam produksi, resepsi, dan transformasi identitas sosial budaya. Oleh karena itu, isu-isu penting yang dihadapi pedagogi kritis mencakup masalah multikulturalisme, ras, identitas, kekuasaan, pengetahuan, etika dan kerja di mana isu-isu ini harus diajarkan di sekolah. *Ketujuh*, pedagogi kritis secara revolusioner menggunakan dunia secara reflektif untuk mewujudkan praksis transformatif pengetahuan melalui kritik epistemologi. Kritik epistemologi ini bertujuan bukan hanya untuk membongkar representasi-representasi pengetahuan, melainkan juga untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa produksi pengetahuan representasi itu terjadi. Pedagogi kritis tidak hanya menelisik isi pengetahuan, tetapi juga metode produksinya.^{xxxvii}

Selanjutnya, beberapa prinsip pedagogi kritis menurut H.A.R Tilaar adalah, *pertama*, dasar utama pedagogi kritis adalah prinsip dialog. *Kedua*, Ilmu sama dengan “Konstruksi Sosial”. *Ketiga*, kelas-kelas sosial mempunyai hubungan-hubungan, dan tidak semua hubungan-hubungan sosial itu memberikan kesempatan untuk pengembangan, pembebasan individu. *Keempat*, adanya hubungan antara “kebudayaan” dan “kekuasaan”. *Kelima*, adanya ideologi dan hegemoni. Artinya, hegemoni^{xxxviii} atau sistem kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari ideologi. *Keenam*, adanya diskursus, maksudnya adalah suatu konsep yang secara anonim berupa aturan-aturan historis, yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, geografis dan lingkungan linguistik. *Ketujuh*, konsepsi kurikulum tersembunyi. *Kedelapan*, reproduksi sosial. *Kesembilan*, adanya kapital budaya (*cultural capital*).^{xxxix}

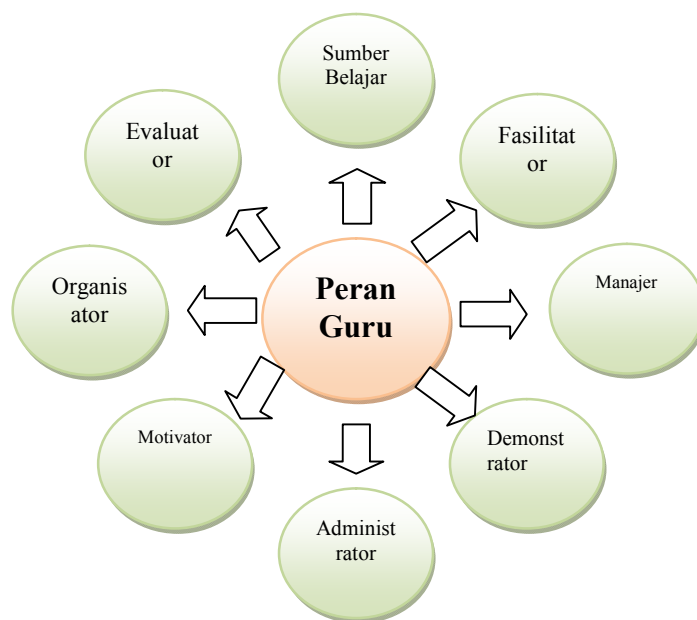
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS

1. Guru Sebagai Pendidik Transformatif

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP. No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.^{xi} Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada jalur dan jenjang yang sudah ditentukan.^{xli}

Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mampu mendidik secara profesional. Di antara kompetensi yang diperlukan adalah: *pertama*, mengenal peserta didik secara mendalam. *Kedua*, menguasai bidang studi. *Ketiga*, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. *Keempat*, meningkatkan profesional secara berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan profesionalitas pelaksanaan tugas sebagai pendidik (kepribadian, pembelajaran, dan komunikasi). Oleh karena itu, sebagai pendidik profesional, seorang guru diidealkan mampu menjadi agen pembelajaran yang edukatif, menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa, dan

inspirasi pembelajaran. Dari penjelasan ini, maka peran guru yang diidealkan tersebut dapat penulis gambarkan seperti skema di bawah ini:



Skema.1

Idealisasi Peran Guru Sebagai Agen Pembelajaran Dan Sebagai Pendidik Profesional

Di samping sebagai agen pembelajaran yang edukatif, guru juga diidealkan memiliki empat kompetensi. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta dalam PP. No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan, bahwa guru sebagai pendidik profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas mengajar. Kompetensi tersebut merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi-kompetensi ini adalah: kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.^{xlii}

Oleh karena itu, guru mempunyai tiga peran: sebagai pendidik, tenaga profesional, dan sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik, ia diidealkan mampu mengenal peserta didik secara mendalam, menguasai bidang studi, dan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik yang disyaratkan, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

Secara akademik, konseptualisasi dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP. No. 74 Tahun 2008 tentang guru tersebut cukup memadai. Tetapi, sebagaimana diungkapkan Agus Nuryatno, bahwa konseptualisasi tersebut belum menunjukkan sisi politis dari peran seorang guru. Lebih dari itu, sebagai pendidik profesional guru harus mampu menjadi pendidik transformatif.^{xliii}

Di sini-lah kemudian perspektif pedagogi kritis diperlukan untuk melihat pengembangan kompetensi guru. Dalam perspektif pedagogi kritis, guru harus memiliki kepekaan-kepekaan politis terhadap posisi dirinya sebagai pendidik. Guru selain sebagai pendidik profesional, ia juga merupakan pendidik transformatif. Artinya, pendidik yang memiliki kesadaran transformatif menyadari adanya muatan, konsekuensi, dan kualitas politis dalam semua aktifitas pendidikan dan pengajaran. Inilah yang dimaksud oleh Henry Giroux bahwa pendidikan selalu bersifat politis. Cara guru mengajar, pilihan pengetahuan yang diajarkan, dan model relasi yang dibangun dalam pembelajaran, semuanya bersifat politis. Oleh karena itu, hal tersebut memiliki kontribusi dalam membentuk subyektifitas peserta didik, baik membuat mereka menjadi *active* atau *passive being*.^{xliv}

Pendidik transformatif memandang, bahwa proses pedagogis tidak sekadar diarahkan untuk membantu peserta didik memperoleh tingkat keterampilan kognitif yang tinggi agar dapat menguasai keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, dalam perspektif pedagogi kritis, guru sebagai pendidik transformatif memandang sukses akademik tidak hanya diukur oleh indikator-indikator kesuksesan kerja. Tetapi, guru dalam kaca mata pedagogi kritis adalah sejauh mana mereka mampu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*), kritis, aktif dan bertanggung-jawab (*critical citizenship*). Dengan kata lain, guru sebagai pendidik transformatif menempatkan pendidikan bukan sebagai *reproductive force*, tetapi sebagai *productive force*, yaitu sebagai media mobilitas sosial. Proses pedagogis diarahkan agar peserta didik mampu mengatasi situasi-batas (*limit-situation*) dan aksi-batas (*limit-action*) mereka.^{xlv}

Guru sebagai pendidik transformatif memandang peserta didik sebagai makhluk yang mensejarah (*historical-being*). Makhluk praksis yang hidup secara otentik hanya ketika terlibat dalam transformasi dunia. Guru sebagai pendidik transformatif harus membantu mengembangkan agensi peserta didik, yaitu kemampuan untuk membentuk dan mengontrol kehidupannya. Peserta didik sebagai agen adalah seseorang yang berkesadaran (*conscious-being*), bukan sekadar orang yang punya kesadaran, atau *prise de conscience*, yang mampu

memahami kehidupan sekitarnya. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik transformatif selalu mengajarkan, bahwa dunia bukan sebagai sesuatu yang “given”, tetapi sebagai dunia yang secara dinamis berada dalam proses “menjadi”. Di sini-lah kemudian, adanya relevansi bahwa mahasiswa/i calon guru di LPTK, sebaiknya diberikan atau diperkenalkan dengan konsep-konsep seperti: *power (kekuasaan)*, *ideology*, *hegemoni*, dan *capital cultural* dalam proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas.

Guru sebagai pendidik transformatif dalam kesadarannya meyakini, bahwa kemampuan peserta didik untuk berpartisipasi dalam penciptaan sejarah manusia. Pertanyaan yang senantiasa ditanamkan kepada peserta didik adalah: “kalau manusia mampu memproduksi sejarah dunia, kenapa mereka tidak bisa merubahnya? Oleh karena itu, keterlibatan peserta didik dalam transformasi dunia tergantung sejauh mana mereka mampu membedakan antara yang natural dan yang kultural. Ketidakmampuan seseorang untuk membedakan keduanya berakibat pada kepasrahan diri total, seolah-olah semua peristiwa di dunia adalah semata-mata takdir, bukan hasil perbuatan manusia. Oleh karena itu, guru harus mampu mengantarkan peserta didik dalam tahap kesadaran kritis.

Guru sebagai pendidik transformatif memandang perlu dikembangkannya *language of critique* dan *language of possibility* dalam proses pendidikan. Artinya, pendidikan seharusnya menjadi media kritik atas realitas sosial dan sekaligus mampu menawarkan kemungkinan-kemungkinan dikembangkannya wilayah publik yang demokratis. Jika kosa kata ini telah menjadi bagian dari guru sebagai pendidik transformatif, maka proses pendidikan dalam pandangan guru adalah bisa diposisikan sebagai kritik ideologi yang memiliki kekuatan aktif dan potensi untuk melakukan kritik sosial dan membangun pandangan yang kritis terhadap dunia, bukan sebagai pemelihara *status quo*.

2. Kompetensi Pedagogis Guru dalam Perspektif Pedagogi Kritis

Kompetensi pedagogis dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, meliputi pengelolaan pembelajaran peserta didik seperti: pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adalah Paulo Reglus Friere di mana gagasannya, cocok untuk menganalisis kompetensi pedagogik ini. Dalam karyanya “*Pedagogy of Indignation*”, sebagaimana dikutip oleh Rakhmat Hidayat menjelaskan, bahwa pentingnya pendidikan dalam perjuangan untuk membangun masyarakat demokratis.^{xlvi} Friere percaya bahwa perubahan dan mobilitas mendefinisikan karakteristik dan ciri-ciri budaya dan

sejarah. Perubahan dapat dipahami hanya dalam hubungan dengan resiko. Tanpa resiko tersebut, perubahan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Freire mendorong pendidik (guru) untuk mengambil resiko yang dipandu oleh studi sejarah, politik, dan budaya.^{xlvi}

Selanjutnya, dalam karya Friere "*Teachers as Cultural Workers: Letters to those who Dare Teach*", sebagaimana dikutip Rakhmat Hidayat memberikan penjelasan, bahwa tugas guru adalah menyenangkan dan menuntut keseriusan serta kemampuan ilmiah. Di sini dapat dimaknai, bahwa guru dituntut memiliki kemampuan fisik, emosional, dan persiapan afektif. Dengan kata lain, guru harus berkomitmen untuk mengembangkan ajaran cinta dalam mengajar.^{xlvi}

Oleh karena itu, Friere dalam karyanya "*Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*", seperti dikutip Rakhmat Hidayat, mengungkapkan beberapa prinsip penting. *Pertama*, tidak ada kegiatan mengajar tanpa belajar. Di dalam prinsip ini, guru seharusnya belajar untuk menghormati apa yang diketahui oleh para siswanya. Guru hendaknya memberikan penguatan kapabilitas untuk kritis, memiliki etika, dan estetika. *Kedua*, pengajaran bukan sekadar mentransfer pengetahuan. *Ketiga*, praktik pendidikan sejatinya berfokus pada percaya diri, kompetensi profesional, dan kedermawanan, komitmen, kebebasan, dan otorita. *Keempat*, penting dicatat bahwa pendidikan mengajarkan proses dialog dan hubungan yang harmonis.^{xlvii}

Dari penjelasan ini dapat dimaknai, bahwa dalam kacamata pedagogi kritis proses pembelajaran sesungguhnya merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses saling belajar satu sama lain. Artinya, pendidik dan peserta didik sama-sama belajar. Sistem pembelajaran sebaiknya memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik. Guru semestinya memberikan posisi kepada peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat perubahan paradigma dari pengajaran bergeser menjadi pembelajaran. Perubahan paradigma tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹

Tabel.1
Perubahan paradigma dari pengajaran menuju paradigma pembelajaran yang harus dipahami oleh guru

No	Paradigma Pengajaran	Paradigma Pembelajaran
1	Berpusat pada guru	Berpusat pada pembelajar/siswa
2	Guru dominan dalam aktor kelas	Guru sebagai fasilitator (penulis skenario)
3	Suasana “tertib”, tenang, kaku dan membosankan	Suasana “hidup”, menyenangkan, dan interaktif
4	Siswa terlibat dalam kompetisi dengan siswa lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Siswa didorong bekerjasama mencapai tujuan. Tolong-menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Siswa adalah tempat guru mencurahkan pengetahuan (<i>banking system</i>). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/re-produksi pengetahuan	Siswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan.
6	Evaluasi oleh guru bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan	Evaluasi oleh siswa bersifat refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi.
7	Sumber belajar buku teks dan guru	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruangan kelas	Tempat belajar tidak terbatas ruang kelas tetapi seluas jagat raya.

3. Kompetensi Kepribadian Guru dalam Perspektif Pedagogi Kritis

Kompetensi kepribadian, dalam PP. No. 74 Tahun 2008 tentang guru sekurang-kurangnya mencakup kepribadian: beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Dari kompetensi kepribadian ini dapat dimaknai, bahwa kemampuan personal guru adalah kemampuan internal yang berhubungan dengan kepribadiannya dalam menunjang tugas-tugas pembelajaran. Seorang guru yang tidak memiliki kemampuan personal yang baik, sudah tentu kemampuan sosialnya akan cacat; pada gilirannya akan mengganggu kinerja sebagai guru. Kemampuan personal ini dimaknai bahwa guru hendaknya berpikir positif, bermuka manis, dan senantiasa tersenyum, optimis, bertutur kata yang baik dan benar, berpenampilan menarik, dan memberi motivasi dan inspirasi kepada orang lain.

Kemampuan personal ini lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi yang baik, bertanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Kemampuan kepribadian (personal) ini mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, peka, objektif,

berwawasan luas, dapat berkomunikasi (dialog) dengan orang lain. Selain itu, kemampuan mengembangkan profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif dan mau belajar sepanjang hayat. Guru harus memiliki moral dan beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang penting, karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik.

Selanjutnya, guru juga harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Aktualisasi diri adalah sikap bertanggung jawab. Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan tanggung jawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi perlu direncanakan dan perlu dikembangkan, juga perlu dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Guru harus memiliki sikap dalam mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, guru bila tidak ingin ketinggalan zaman harus terbuka terhadap pengetahuan. Ia harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus belajar.

Dalam konteks ini, konsep tersebut dapat dihubungkan dengan yang dikatakan Paulo Friere sebagai aktivitas “aksi-refleksi”. Setiap pemahaman realitas lambat atau cepat akan diikuti oleh aksi atau tindakan yang selanjutnya direfleksikan. Sekali manusia menangkap adanya tantangan, memahaminya, dan merumuskan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkannya, ia akan bertindak dan selanjutnya merefleksikannya.¹¹Dengan demikian, metode yang ditawarkan adalah mendasarkan diri pada dialog (komunikasi) yakni hubungan horisontal antara pribadi-pribadi. Bila digambarkan adalah sebagai berikut:



Skema.2

Metode Dialog Horisontal Antar Guru dan Siswa
Sebagai Komunikasi Antar Pribadi-Pribadi

Dalam gambar di atas terlihat, bahwa hubungan “empati” antara dua “kutub” yang sama-sama terlibat dalam pencarian bersama. Induk dari dialog ini adalah cinta, rendah hati, penuh harapan, kepercayaan, dan sikap kritis. Berinduk pada sikap kritis tersebut, dialog menularkan sikap kritis pula. Maka, dialog ditumbuhkan melalui cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan iman. Bila dua “kutub” dialog ini dirangkaikan oleh cinta, harapan,

dan saling percaya, maka pendidik kritis secara kritis dapat melakukan pencarian bersama-sama. Di sini dapat dimaknai, bahwa hanya dalam kepercayaan, dialog memiliki kekuatan dan makna.^{lii} Dari sini, dapat ditangkap sebuah makna, bahwa kompetensi kepribadian guru dalam perspektif pedagogi kritis dipahami bahwa seseorang yang menjadi guru harus memiliki sikap/ kompetensi seperti: empati, cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan iman. Bila dianalisis lebih jauh, konsep ini selaras dengan kompetensi kepribadian guru yaitu: beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

4. Kompetensi Sosial Guru dalam Perspektif Pedagogi Kritis

Untuk menganalisis kompetensi sosial ini, adalah sangat relevan jika mengaitkannya dengan pemikiran Henry Giroux yang mengatakan, bahwa guru pada hakekatnya adalah sebagai intelektual publik. Dalam buku yang ditulis Henry Giroux, *Border Crossing: Cultural Workers and the Politics of Education*^{liii}, sebagaimana dikutip Rakhmat Hidayat, Giroux mengembangkan tema kunci tentang tantangan keseluruhan terhadap neo-liberalisme dan pembagian masyarakat kelas dan pengembangan pedagogi kritis progresif. Ia berbicara secara terus menerus tentang pentingnya keterlibatan guru sebagai intelektual publik dalam keterlibatan demokratis dalam kehidupan publik.

Menurut Giroux, seperti dikutip Rakhmat Hidayat, guru harus progresif memajukan demokrasi dan memperkuat pemberdayaan partisipatif manusia dalam berbagai subjek kehidupan sosial.^{liv} Guru progresif perlu tahu lebih banyak tentang pembentukan identitas dan nilai-nilai moral. Maka, peran guru di sekolah dipandang sebagai intelektual transformatif. Giroux mengungkapkan bahwa penting melibatkan orang-orang seperti guru dalam dialog kritis yang mampu mengidentifikasi berbagai cara dan sistem menindas. Dalam konteks ini, kompetensi sosial dapat dimaknai bahwa guru harus berperan sebagai intelektual publik atau guru progresif. Guru progresif adalah guru yang mampu menumbuhkan sikap demokratis bagi subyek didik agar dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar di ruang kelas. Guru progresif memiliki kompetensi dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai moral serta menciptakan budaya yang memberikan kebebasan bagi setiap subyek didik untuk berkembang.^{lv}

Oleh karena itu, guru sebagai intelektual publik adalah guru yang mampu membangkitkan sistem demokrasi dan mampu menggunakan media teknologi di sekolah. Dengan melihat guru sebagai intelektual publik dapat dimaknai, bahwa guru tidak semata-

mata sebagai pekerja yang melakukan tugasnya dengan alat profesional, seperti merumuskan kompetensi, indikator, dan hasil belajar. Namun, guru juga bekerja dengan bermacam-macam bentuk pikir, seperti refleksi, kreativitas, dan imajinasi.^{lvi} Guru sebagai intelektual publik menunjukkan, bahwa guru mempunyai *fungsi sosial dan politis*. Dalam konteks ini, Giroux seperti dikutip Lody Paat, mengajukan pandangannya bahwa guru merupakan intelektual transformatif yang memiliki dua tugas utama: *pertama*, sebagai intelektual transformatif, guru harus membuat yang pedagogis menjadi lebih politis. *Kedua*, guru harus membuat yang politis menjadi lebih pedagogis.^{lvii}

5. Kompetensi Profesional Guru dalam Perspektif Pedagogi Kritis

Guru profesional-transformatif dalam perspektif pedagogi kritis harus menguasai sumber-sumber kekuasaan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam membekali guru profesional-transformatif, penting kiranya memberikan pemahaman kepada mereka tentang konsep *hidden curriculum*. Giroux dalam buku "*Teachers as Intellectuals*" seperti dikutip Rakhmat Hidayat mengatakan, bahwa guru harus menggunakan konsep ideologi sebagai kritik dalam rangka mempertanyakan asumsi pedagogis tentang pengetahuan, pembelajaran, prestasi, sifat manusia, objektivitas, relasi guru-siswa, dan pihak sekolah. Praktik-praktik pedagogis ini harus diuji terhadap potensi mereka (baca: guru) untuk mendorong, bukan menghambat pertumbuhan intelektual dan pengamatan sosial. Proses tersebut dapat dilakukan dalam proses refleksi diri (*self critics*) yang diperlukan jika guru ingin bergerak di luar peran menjadi agen reproduksi pengetahuan dan budaya. Oleh karena itu, gagasan tentang kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) juga dikaitkan dengan gagasan pembebasan dan didasarkan pada nilai-nilai martabat pribadi dan keadilan sosial. Maka, guru yang memiliki kompetensi profesional-transformatif harus mengerti bahwa esensi dari kurikulum tersembunyi dibentuk dalam pengembangan teori pendidikan yang bersangkutan dengan memproduksi pengetahuan dan mentransformasikannya.^{lviii}

Sayangnya, kendala ideologis dan material yang membuat sulit bagi guru untuk mengasumsikan peran dan hak mereka sebagai intelektual transformatif adalah adanya proses reduksi peran mereka hanya sebatas pekerjaan teknis khusus dalam birokrasi sekolah, yang fungsinya kemudian menjadi salah satu pengelola dan melaksanakan program kurikulum daripada mengembangkan atau kritis terhadap kurikulum.^{lix} Tentu saja ini menjadi kondisi yang memprihatinkan. Hal ini dianggap sebagai proses ideologisasi penurunan peran guru dari meningkatnya perkembangan ideologi instrumental yang menekankan pendekatan

teknokratis. Giroux seperti dikutip Rakhamat Hidayat mengungkapkan, bahwa program pelatihan guru seringkali mengajarkan metodologi untuk menyangkal kebutuhan berpikir kritis. Lebih khusus lagi, alih-alih belajar untuk mengajukan pertanyaan tentang prinsip-prinsip yang mendasari metode kelas yang berbeda, teknik penelitian dan teori-teori pendidikan, justru guru mengajarkan kepada siswanya disibukkan dengan mempelajari “bagaimana (*how to*), dengan “apa yang berhasil,” (*what works*) atau dengan menguasai cara terbaik untuk memproduksi pengetahuan. Inilah pendekatan yang disebut pendekatan teknokratik yang mereduksi peran guru hanya sebatas pengembangan dan perencanaan kurikulum dan penjurian dan pelaksanaan instruksi kelas.^{ix}

Oleh karena itu, guru dalam perspektif pedagogi kritis, semestinya secara aktif terlibat dalam memproduksi bahan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial di mana mereka mengajar. Tujuannya adalah menjadikan guru sebagai “intelektual transformatif” yang dapat mendidik siswa untuk aktif, warga negara yang kritis, dan berbicara menentang ketidakadilan ekonomi, politik, dan sosial baik di dalam maupun di luar sekolah. Dengan kata lain, guru sebagai “intelektual transformatif” adalah menjadikan siswa dapat berbicara menentang ketidakadilan ekonomi, politik, dan sosial baik di dalam maupun di luar sekolah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa secara akademik konseptualisasi kompetensi guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP. No. 74 Tahun 2008 tentang guru, cukup memadai dalam konteks pendidikan Indonesia. Namun demikian, konseptualisasi kompetensi guru tersebut, bila ditelaah lebih dalam, belum menunjukkan sisi politis dari peran seorang guru. Oleh karena itu, profesi guru sesungguhnya bukan hanya sebagai pendidik profesional saja. Tetapi lebih jauh dapat dimaknai, bahwa peran guru merupakan pendidik transformatif dalam pendidikan dan pembelajaran. Argumentasi ini dapat diletakkan dalam perspektif pengembangan guru dalam bingkai pedagogi kritis.

ⁱA Rizali, I D Sidi, dan S Dharma, *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional* (Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 1–2.

ⁱⁱJ Sumardianta, *Guru Gokil Murid Unyu* (Yogyakarta: Bentang, 2016), x.

-
- ⁱⁱⁱH.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 374.
- ^{iv}H A R Tilaar, *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 242.
- ^v*Ibid.*, 243.
- ^{vi}H A R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 175–176.
- ^{vii}F Mangunwijaya and Penerbit Buku Kompas, *Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 108. Lihat juga, Rakhmat Hidayat, “Kurikulum Sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan: Konseptualisasi Gagasan Michael Apple Hingga Pierre Bourdieu,” *Jurnal Komunitas* 3 (2009): 1.
- ^{viii}Arif Rohman, *Guru Dalam Pusaran Kekuasaan: Potret Konspirasi Dan Politisasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 127.
- ^{ix}Tilaar, *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 242.
- ^xSusan L Groenke, “Social Reconstructionism and the Roots of Critical Pedagogy: Implications for Teacher Education in the Neoliberal Era,” in *Critical Pedagogy and Teacher Education in the Neoliberal Era* (London, New York: Springer, 2009), 3–17.
- ^{xi}*Ibid.*, 3.
- ^{xii}Joe L Kincheloe, *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, vol. 1 (London, New York: Springer, 2008), 8.
- ^{xiii}*Ibid.*, 9.
- ^{xiv}Barry Kanpol, *Critical Pedagogy: An Introduction* (London: Greenwood publishing group, 1999), 27.
- ^{xv}Tony Monchinski, “Critical Pedagogy in the Everyday Classroom,” in *Critical Pedagogy And The Everyday Classroom* (London, New York: Springer, 2008), 115–39.
- ^{xvi}Rakhmat Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2013), 7.
- ^{xvii}*Ibid.*, 7-8.
- ^{xviii}*Ibid.*, 7.
- ^{xix}*Ibid.*, 6
- ^{xx}M Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 2–3.
- ^{xxi}Kincheloe, *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, 1:10.
- ^{xxii}Monchinski, “Critical Pedagogy in the Everyday Classroom,” 1–3.
- ^{xxiii}*Ibid.*, 2.
- ^{xxiv}*Ibid.*, 3.
- ^{xxv}T Monchinski, *Engaged Pedagogy, Enraged Pedagogy: Reconciling Politics, Emotion, Religion, and Science for Critical Pedagogy* (Rotterdam Netherlands: Sense Publisher, 2011), 10.
- ^{xxvi}Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*, 1.
- ^{xxvii}H A R Tilaar, *Pedagogik Teoretis Untuk Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), 99.
- ^{xxviii}Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, 532.
- ^{xxix}Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2012), 99.
- ^{xxx}Perkembangan pedagogi kritis di Indonesia oleh H.A.R Tilaar disebut sebagai pedagogi transformatif. Pedagogi transformatif pada dasarnya merupakan suatu pedagogi kritis, namun untuk menghilangkan nilai negatif yang melekat pada pedagogi kritis yang seakan-akan hanya menekankan kepada kritik terhadap teori dan proses pendidikan, Tilaar menyebutnya sebagai pedagogi transformatif. Pedagogi transformatif menekankan pada alternatif baru yang disodorkan sesudah kajian kritis terhadap praksis pendidikan yang berlaku. Lihat, Tilaar, *Pedagogik Teoretis Untuk Indonesia*, 238.
- ^{xxxi}Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, 532.
- ^{xxxii}Kesadaran Kritis, konsep ini khususnya dikembangkan oleh Paulo Freire di dalam idenya “*conscientization*”, yang berarti mengembangkan kesadaran seseorang mengenai kehidupannya sendiri, yang telah terbelenggu di dalam rekayasa kehidupan sosial tertentu. Pendidikan seharusnya merupakan proses pembebasan, dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. *Conscientization* adalah sebuah konsep yang

mengatakan, bahwa setiap manusia mampu melihat secara kritis terhadap dirinya dalam suatu dialog dengan orang lain. Melalui pertemuan tersebut secara berangsur-angsur dia dapat memandang realitas personal dan sosialnya serta kontradiksi di antara keduanya, memiliki kesadaran akan persepsi dirinya terhadap realitas sosialnya dan terhadap kemampuannya untuk mengubah realitas tersebut melalui tindakan secara kolektif.

^{xxxiii}Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran*, 6.

^{xxxiv}Barry Kanpol, *Issues and Trends in Critical Pedagogy* (New Jersey: Hampton Press, 1997), 80–81.

^{xxxv}Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan*, 67.

^{xxxvi}*Ibid.*, 68-71.

^{xxxvii}Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*, 7.

^{xxxviii}Hegemoni adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci (1891-1937), seorang intelektual kritis berasal dari Sardinia. Hegemoni dalam pengertian Gramsci sebagaimana dikutip Livingstone dimaknai: “*A social condition in which all aspects of social reality are dominated by or supportive of a single class*. Hegemoni adalah sebuah kondisi sosial dimana semua aspek-aspek dari realitas sosial didominasi atau didukung oleh kelompok dominan. “*Single Class*” dalam konteks sekarang lebih tepat diganti dengan “*dominant group*” (kelompok dominan), untuk menggambarkan kompleksitas kekuasaan bermain. Lihat, David W Livingstone, “On Hegemony in Corporate Capitalist States: Material Structures, Ideological Forms, Class Consciousness, and Hegemonic Acts,” *Sociological Inquiry* 46, no. 3-4 (1976): 235–50. Lihat juga, Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*, 33.

^{xxxix}Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, 235–241.

^{xl}Lihat, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1; dan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1.

^{xli}Lihat, pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 4, pasal 6, pasal 8 UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

^{xlii}Lihat, pasal 10 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan pasal 3 PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

^{xliii}Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*, 86.

^{xliv}*Ibid.*, 87.

^{xlv}Situasi Batas (*limit-situation*) adalah situasi sosial yang menghambat atau kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang dan memaksimalkan potensi kemanusiaan mereka. Aksi-batas (*limit-action*) adalah keterbatasan peserta didik untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka melampaui situasi-batas mereka.

^{xlvi}Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran*, 24.

^{xlvii}*Ibid.*, 24.

^{xlviii}*Ibid.*, 24.

^{xlix}*Ibid.*, 25.

^l*Ibid.*, 29-30.

^{li}Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (Jakarta: Gramedia, 1984), 44–45.

^{lii}*Ibid.*, 45.

^{liii}Henry Giroux and Joe L Kincheloe, “Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education,” *Journal of Education* 174, no. 1 (1992): 130–35.

^{liv}Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran*, 81.

^{lv}*Ibid.*, 81.

^{lvi}Tilaar, *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 244.

^{lvii}*Ibid.*, 244-245.

^{lviii}Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran*, 88.

^{lix}*Ibid.*, 90.

^{lx}*Ibid.*, 90.

DAFTAR PUSTAKA

- Freire, Paulo. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Giroux, Henry, and Joe L Kincheloe. "Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education." *Journal of Education* 174, no. 1 (1992): 130–35.
- Groenke, Susan L. "Social Reconstructionism and the Roots of Critical Pedagogy: Implications for Teacher Education in the Neoliberal Era." In *Critical Pedagogy and Teacher Education in the Neoliberal Era*, 3–17. London New York: Springer, 2009.
- Hidayat, Rakhmat. "Kurikulum Sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan: Konseptualisasi Gagasan Michael Apple Hingga Pierre Bourdieu." *Jurnal Komunitas* 3 (2009): 1.
- . *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2013.
- Kanpol, Barry. *Critical Pedagogy: An Introduction*. London: Greenwood publishing group, 1999.
- . *Issues and Trends in Critical Pedagogy*. New Jersey: Hampton Press, 1997.
- Kincheloe, Joe L. *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*. Vol. 1. London, New York: Springer, 2008.
- Livingstone, David W. "On Hegemony in Corporate Capitalist States: Material Structures, Ideological Forms, Class Consciousness, and Hegemonic Acts." *Sociological Inquiry* 46, no. 3 (1976): 235–50.
- Mangunwijaya, F, and Penerbit Buku Kompas. *Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Monchinski, T. *Engaged Pedagogy, Enraged Pedagogy: Reconciling Politics, Emotion, Religion, and Science for Critical Pedagogy*. Rotterdam Netherlands: Sense Publisher, 2011.
- Monchinski, Tony. "Critical Pedagogy in the Everyday Classroom." In *Critical Pedagogy And The Everyday Classroom*, 115–39. London, New York: Springer, 2008.
- Nuryatno, M Agus. *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- Rizali, A, I D Sidi, and S Dharma. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Rohman, Arif. *Guru Dalam Pusaran Kekuasaan: Potret Konspirasi Dan Politisasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2012.
- Sumardianta, J. *Guru Gokil Murid Unyu*. Yogyakarta: Bentang, 2016.
- Tilaar, H A R. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- . *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- . *Pedagogik Teoretis Untuk Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial Dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.